

Daftar Isi

Implikasi Peningkatan Keterwakilan Perempuan Bagi Pemenuhan Kepentingan Perempuan (Studi pada DPRD Provinsi DIY) Machya Astuti Dewi & Saptopo B. Ilkodar	93-100
Explaining Foreign Policy Change Vinsensio Dugis	101-104
Legislatif Rente: Persekongkolan Politik Kepala Daerah - DPRD Sebagai Dasar Penyebab KKN di Jawa Timur Aribowo.....	105-114
Orientasi Aktor dalam Perumusan Kebijakan Publik Budi Prasetyo	115-130
Pemimpin Visioner dan Kaderisasi Kepemimpinan Rahma Sugihartati.....	131-136
Tindakan Perdagangan Perempuan dalam Proses Pengiriman Buruh Migran di Madura Devi Rahayu.....	137-145
Perspektif Fenomenologi tentang Trafficking TKW Mustain Mashud	146-154
Lansia Terlantar: Strategi Membangun Harapan Hidup dan Citra Subagyo Adam.....	155-162
Industrialisasi MIGAS dan Eksistensi Masyarakat Lokal: Hasil Studi di Teluk Bintuni, Papua Bagong Suyanto	163-173
Program Pembangunan Kesehatan: Masyarakat Desa Wuwuharjo dalam Proyek Inovasi Rusyad Adi Suriyanto	174-180
Aksi Borong Kondom pada Pelajar di Kabupaten Pamekasan – Madura Yan Ariyani	181-186
Motivasi Ekoturis dalam Pariwisata Berbasis Alam (<i>Ecotourism</i>): Studi Kasus di Wana Wisata Coban Rondo, Malang Dian Yulie Reindrawati.....	187-192
Ilmu Manajemen Preskriptif Vs Deskriptif, Suatu Tinjauan dari Perspektif Filsafat Ilmu Siswanto	193-202

Industrialisasi MIGAS dan Eksistensi Masyarakat Lokal: Hasil Studi di Teluk Bintuni, Papua

Bagong Suyanto¹

Departemen Sosiologi FISIP, Universitas Airlangga
Koordinator Bidang Kemasyarakatan Dewan Pakar Provinsi Jawa Timur

ABSTRACT

Development and industrialization, wherever they are, including in Bintuni Bay, Papua, have always brought dilemmas. Not only brought changes and shifting in local culture, industrialization also emerged potential frictions, even conflicts. This study found that many social problems faced by the local community in Bintuni Bay were more complex than underdevelopment, lack incomes, the absence of production assets to run their life, or the impact of industrialization process which involved not as many of the local community participation. Many allocations of fund that had been spent, and the programs performed by the industry and the local government could not compete with the race of problems acceleration increasing in the local community around Bintuni Bay. The industrialization process which is occurring in the area of Bintuni Bay should not lacerate nor destroy the self-potential of the local people. Empowerment program of local the community must be done fully, rather than partially or temporarily. It is also very important to reconsider whether the planned-reconstruction program is really suitable for the people's characteristics, and able to meet their needs.

Key words: industrialization, local community, conflict, self-potential

Pembangunan dan industrialisasi di mana pun, tak terkecuali di wilayah Teluk Bintuni, Provinsi Papua sesungguhnya selalu akan melahirkan sejumlah dilema.² Di satu sisi industrialisasi diharapkan dapat menjadi jalan keluar dan pintu terobosan untuk mempercepat upaya penanggulangan kemiskinan dan keterbelakangan. Tetapi, di sisi yang lain industrialisasi dan investasi berbagai kekuatan komersial ternyata seringkali malah melahirkan proses marginalisasi, kerusakan ekologis dan tidak berkesuaian dengan kebutuhan masyarakat lokal. Kajian berikut ini dilakukan untuk menjawab pertanyaan: apakah hal yang serupa akan juga terjadi di kawasan Teluk Bintuni, Provinsi Papua?

Dilacak ke belakang, industrialisasi dan perubahan sosial yang terjadi di kawasan Teluk Bintuni dan di Provinsi Papua pada umumnya, sebetulnya tidak hanya baru terjadi pada era reformasi, atau setelah diberlakukannya kebijakan otonomi khusus di Papua.³ Paling-tidak dalam kurun waktu 30 tahun terakhir, proyek transmigrasi dan masuknya berbagai usaha perniagaan di wilayah Papua telah memicu terjadinya perubahan sosial, ekonomi dan budaya yang signifikan di wilayah ini.⁴ Di wilayah-wilayah yang memiliki potensi sumber daya alam yang menarik minat investor, sudah tentu perubahan yang terjadi lebih dini dan lebih cepat

¹ Korespondensi: B. Suyanto, Departemen Sosiologi, FISIP, UNAIR, Jl. Airlangga 4-6 Surabaya 60286, Indonesia. Telp. (031) 5011 744. E-mail: bsuyanto_fisip@unair.ac.id

² Sebutan Papua pertama kali dikemukakan oleh Jonge de Menezes, Gubernur Portugis di Ternate yang mendarat di Pulau Waigeo dan tinggal selama beberapa bulan di Warsai, Kepala Burung pada tahun 1526 sampai 1527. Ia menyebut wilayah Papua dengan sebutan *Ilhas dos Papuas*. Untuk lebih jauh lihat: JR Mansoben: Arti Sebuah nama: Penggunaan nama Papua untuk menggantikan nama Irian Jaya, dalam: Masyarakat Indonesia, majalah Ilmu-Ilmu Sosial Indonesia (LIPI) XXX, No. 1, 2004: 1-14

³ Di Provinsi Papua secara keseluruhan terdapat minimal 250 suku. Papua terdiri dari 12 kabupaten, di mana salah satunya adalah Kabupaten Manokwari. Manokwari sendiri terdiri dari 4 kecamatan atau distrik, masing-masing adalah Babo (22 kampung), Bintuni (10 kampung), Aranday (9 kampung). Sedangkan di Kabupaten Fak-Fak hanya 1 kecamatan atau distrik, yakni Kecamatan Kokas yang terdiri atas 44 kampung. Sejak tahun 2004, di Provinsi Papua terdapat 28 kabupaten. Kabupaten Bintuni yang sebelumnya merupakan salah satu distrik di Kabupaten Manokwari dimekarkan menjadi kabupaten tersendiri pada tahun 2002

⁴ Pada tahun 1993, Gubernur Papua telah mengundang 50 konglomerat dan pelaku bisnis agar mereka tertarik menanamkan investasi di wilayah Papua. Untuk lebih lengkapnya lihat: Stephen Kakisina dan Augustinus Rumansara, "The Indonesian Political Economy and Its Impact Toward the Papuan People's Economy", yang dipresentasikan pada *Round Table Focused on the Political and Social Development in Papua in Berlin, Germany*, Juni 29-30, 2000.

karena dihela masuknya industrialisasi dan para pendatang.⁵

Di era Orde Baru, ketika pemerintah mencanangkan program yang disebut “kebijakan ke arah Timur”, yang bertujuan untuk mendorong investasi di wilayah Indonesia bagian Timur, sejak itu pula arus investasi yang masuk ke wilayah Papua mulai meningkat pesat.⁶ Sejumlah perusahaan di bidang perkayuan, perikanan, pertanian, dan juga pertambangan mulai banyak melirik Papua, termasuk ke kawasan Teluk Bintuni, karena potensi sumber daya alam yang ada di kawasan ini memang menjanjikan. Walau kondisi infrastruktur, sarana dan prasarana yang ada relatif belum memadai, namun demikian potensi sumber daya alam yang berlimpah di berbagai wilayah di Provinsi Papua, bagaimana pun juga adalah pemikat yang membuat para pengusaha tidak mungkin menutup mata begitu saja.

Teluk Bintuni, misalnya adalah salah satu teluk di Provinsi Irian Jaya Barat yang memiliki potensi sumber daya alam sangat berlimpah, termasuk potensi di sektor kehutanan, perikanan dan sumber gas bumi. Teluk Bintuni secara geografis memiliki konfigurasi hutan mangrove sangat luas, bahkan terluas di Papua. Luas kawasan hutan mangrove di Teluk Bintuni tercatat sekitar 260 ribu hektar, dengan kandungan sumber daya alam yang beraneka ragam, mulai dari flora, fauna, hasil-hasil tambang, dan lain sebagainya. Konfigurasi seperti ini membentuk ekosistem kawasan mangrove yang mempunyai fungsi ekologis dan ekonomis bagi masyarakat setempat. Fungsi yang cukup penting dari hutan mangrove kecuali sebagai kawasan penahan abrasi pantai, adalah juga sebagai tempat berpijah udang dan ikan secara alami. Sementara fungsi ekonomisnya adalah sebagai penunjang kebutuhan hidup masyarakat di sekitarnya, dan bahkan masyarakat luar yang memperoleh manfaat dari hasil laut dan kayu yang melimpah di sana.⁷

Sejumlah Perubahan

Kawasan Teluk Bintuni sendiri terletak di Irian Jaya bagian Barat, yaitu di bagian mulut kepala burung pada koordinat 132036' – 134036' BT dan 03015' – 03032' LS. Luas wilayah Teluk Bintuni mencakup 22.817,44 kilometer persegi atau 60,7% dari seluruh luas Kabupaten Manokwari. Di kawasan Teluk Bintuni diperkirakan terdapat sekitar 7 suku besar, antara lain adalah suku Wamesa, Sebyar, Soub, Irarutu, Kuri dan Simuri.⁸ Suku-suku lokal ini, sebagian mungkin telah ikut menikmati dan menjadi bagian dari proses industrialisasi yang sudah dan tengah berlangsung di kawasan itu. Tetapi, seperti juga terjadi di daerah yang lain, tidak jarang penduduk setempat dalam beberapa hal juga menjadi korban situasi dan terpaksa harus menanggung akibat kegiatan eksploitasi dan eksploitasi sumber daya alam yang lepas kendali.

Kajian yang dilakukan Pusat Studi Asia Pasifik-UGM, Konphalindo, WWF dan YDPTB pada bulan Februari 1999, misalnya telah membuktikan bahwa di Teluk Bintuni telah terjadi perubahan ekosistem sebagai akibat terjadinya sedimentasi, kekeruhan dan perubahan sifat-sifat kimiawi air di perairan di Teluk Bintuni. Pengembangan berbagai kegiatan yang dilakukan perusahaan bidang pertambangan, kehutanan, perumahan, transmigrasi maupun budidaya pertanian yang membuka lahan hutan dan mengkonservasinya untuk keperluan lain telah mendorong terjadinya peningkatan erosi dalam skala besar yang terbawa oleh sistem aliran sungai dan diendapkan di perairan Teluk Bintuni, sehingga cepat atau lambat mengancam kelangsungan sumber daya alam yang tersedia, khususnya *food security*.

H. Jack Ruitenbeek (1992) (lihat: Leksono, 2000) melaporkan bahwa di kawasan Teluk Bintuni kegiatan ekspor kayu cacahan (*wood-chips*), merupakan salah satu ancaman potensial terhadap

⁵ Uraian lebih lengkap tentang Provinsi Papua dapat dilihat pada: Agus Sumule (ed.), *Mencari Jalan Tengah Otonomi Khusus Provinsi Papua*. Jakarta: Gramedia, 2003.

⁶ Sejak Orde Baru sebetulnya telah disadari bahwa persoalan yang dihadapi Indonesia bukan hanya meluasnya kemiskinan, tetapi juga kesenjangan sosial dan kesenjangan antarwilayah. Untuk itu, dalam rangka mempersempit kesenjangan antarwilayah, salah satu program yang dikembangkan adalah mencoba mengembangkan kegiatan pembangunan di wilayah Indonesia Timur, termasuk Provinsi Papua. Di era reformasi, di masa pemerintahan Gus Dur, Megawati dan SBY-Kalla, bahkan di jajaran kabinet dibentuk Kantor Menteri Negara Pembangunan Kawasan Tertinggal, di mana hal ini dilakukan untuk mempercepat upaya pembangunan di kawasan Indonesia Timur.

⁷ Uraian lengkap tentang kondisi geografis dan ekologis Kawasan Teluk Bintuni dapat disimak pada: P.M. Laksono (et.al.), *Perempuan di Hutan Mangrove, Kearifan Ekologis Masyarakat Papua*. Yogyakarta: Kerjasama Galang Press dan KEHATI serta PSAP-UGM, 2000. Buku memang banyak membahas tentang peran perempuan lokal dalam pemanfaatan dan pelestarian hutan mangrove, tetapi di dalamnya juga banyak dipaparkan kondisi geografis, flora dan fauna, serta kondisi penduduk lokal di Kawasan Teluk Bintuni.

⁸ Studi ini hanya memfokuskan kajian pada dua suku terbesar di kawasan Teluk Bintuni yang terkena dampak langsung pembangunan proyek BP Berau, yakni suku Sebyar dan Semuri.

kelangsungan ekosistem hutan mangrove di Teluk Bintuni. Habitat hidup moluska dan kepiting, misalnya diperkirakan akan terganggu akibat adanya pembukaan hutan mangrove yang menyebabkan meningkatnya intensitas cahaya dan tingkat abrasi.

Di samping itu, eksplorasi dan eksploitasi yang terjadi di wilayah perairan akibat pembukaan industri perikanan, dalam beberapa kasus selain menimbulkan perubahan pola produksi nelayan lokal, ternyata juga melahirkan tekanan kemiskinan yang cukup meresahkan. Dilaporkan, sekitar 200 kapal trawler besar yang menyapu Teluk Bintuni sampai ke pinggiran hutan mangrove, bukan saja menyebabkan terjadinya *overfishing*, tetapi juga menyebabkan nelayan kecil dan nelayan tradisional mengalami proses marjinalisasi.⁹ Wilayah perairan pantai yang sebelumnya mampu menghidupi dan memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga nelayan tradisional, pelan-pelan makin tidak bersahabat, akibat kegiatan modernisasi perikanan.

Berbeda dengan nelayan modern yang acapkali mampu merespon perubahan dan lebih mampu menyalasi tekanan perubahan dan kondisi *overfishing*, nelayan kecil dan tradisional seringkali justru mengalami proses marjinalisasi dan menjadi korban dari kegiatan industri perikanan yang daya jelajah dan dukungan teknologinya jauh lebih canggih. Akibat keterbatasan teknologi yang dimiliki, ruang gerak nelayan tradisional umumnya sangat terbatas: mereka hanya mampu beroperasi di perairan pantai (*in shore*). Kegiatan penangkapan ikan hanya dilakukan dalam satu hari sekali melaut (*one day a fishing trip*).¹⁰ Bisa dibayangkan, apa yang dapat dilakukan nelayan lokal yang masih mempergunakan alat tangkap tradisional ketika mereka harus berhadapan dengan kekuatan industri perikanan yang luar biasa?

Sepanjang kegiatan industrialisasi hanya mengeksploitasi sumber daya alam, dan tidak melakukan reinvestasi bagi pengembangan dan pemberdayaan masyarakat lokal, maka dapat dipastikan akan terjadi sejumlah perubahan sosial, ekonomi, politik dan budaya —yang bukan hanya mengancam kelangsungan ekosistem, tetapi juga kelangsungan hidup masyarakat setempat. Secara garis besar, sejumlah perubahan yang terjadi di kawasan Teluk Bintuni adalah:

Pertama, kehadiran berbagai perusahaan dan kekuatan komersial di sebuah wilayah, termasuk di kawasan Teluk Bintuni akan melahirkan berbagai perubahan pola-pola interaksi pada komunitas lokal, khususnya desa-desa yang terkena dampak langsung atau disebut sebagai *Directly Affected Villages* (DAVs) kehadiran proyek itu. Di wilayah manapun, industrialisasi niscaya akan menyebabkan terjadinya perubahan karena didorong tiga faktor, yaitu proses komersialisasi, infiltrasi dan invasi para pendatang, dan proses difusi.

Kedua, kehadiran industrialisasi akan melahirkan pergeseran dan perubahan budaya masyarakat, termasuk di dalamnya adat-istiadat, tradisi, hukum adat, norma lokal, ritus, gaya hidup, dan bahkan nilai-nilai budaya yang menjadi kerangka acuan berpikir dan hidup masyarakat lokal. Sebuah komunitas atau suku yang semula hidup relatif terisolasi, jarang berinteraksi dengan pranata-pranata modern, niscaya mereka cepat atau lambat akan melakukan proses adaptasi —yang sebagian mungkin berhasil, tetapi sebagian yang lain mungkin gagal sehingga terpaksa harus tersisih dari kehidupan baru yang lahir karena dihela industrialisasi.

Ketiga, kehadiran industrialisasi dalam beberapa kasus acapkali pula melahirkan potensi gesekan, dan bahkan konflik yang sifatnya terbuka, karena adanya harapan yang berlebihan, yang tidak sesuai dengan kenyataan yang dihadapi di lapangan. Bisa dibayangkan, apa yang bakal terjadi jika di sebuah wilayah yang relatif belum berkembang, atau bahkan agak terisolasi seperti di kawasan Teluk Bintuni hadir sebuah perusahaan multinasional dengan seluruh pranata yang dimilikinya. Mulai dari soal rekrutmen pegawai, keeksklusifitas gaya hidup para pendatang, pranata kerja, dan sebagainya jelas perusahaan itu memiliki kriteria dan mekanisme tersendiri, yang dalam banyak hal tidak mungkin dapat dipenuhi oleh masyarakat setempat, yang kebanyakan secara sosial belum memiliki kemampuan dan basis sosial yang memadai. Pertemuan dua subkultur yang berbeda dalam sebuah proses perubahan sosial dan budaya —terlebih antara kultur dunia industri dan kultur masyarakat lokal, yang acapkali dinilai tidak paralel dengan kepentingan dunia industri— tidak mustahil akan potensial memicu terjadinya gesekan bila tidak dikelola dengan baik.

⁹Lihat: P.M. Laksono (2000).

¹⁰Uraian tentang dampak modernisasi perikanan terhadap kehidupan nelayan tradisional dapat disimak pada: Mubyarto, Loekman Soetrisno & Michael Dove. *Nelayan dan Kemiskinan, Studi Ekonomi Antropologi di Dua Desa Pantai*. Jakarta: Rajawali Press, 1984; Kusnadi. *Konflik Sosial Nelayan, Kemiskinan dan Perebutan Sumberdaya Perikanan*. Yogyakarta: LKiS, 2002; Kusnadi (ed.), *Akar Kemiskinan Nelayan*. Yogyakarta: LKiS, 2003.

Di sejumlah daerah yang mengalami proses industrialisasi, potensi pergesekan dan konflik yang terjadi di masyarakat lokal biasanya bukan sekadar bersumber pada terjadinya kecemburuan sosial dan perbedaan kultur masyarakat lokal dan para pendatang yang serba modern. Tetapi, sesungguhnya konflik itu juga berakar pada nilai-nilai sejarah politik ekonomi sejak jaman kepenguasaan pemerintah kolonial sampai ke kelahiran korporatisme negara atas sumber daya alam pada jaman ke pemerintahan Orde Baru hingga era reformasi di Indonesia. Korporatisme negara tersebut tercermin dari lahirnya peraturan perundang-undangan yang sifatnya sentralistik, atas dasar asas unifikasi, yang dikemas dalam kerangka berpikir yang legalistik, tetapi sulit dicerna nalar warga masyarakat di lingkungan komunitas lokal yang serba tradisional.¹¹

Secara teoritis, konflik dan protes terbuka masyarakat lokal terhadap kehadiran dunia industri, lebih banyak terjadi jika peran pemerintah yang diharapkan dapat berfungsi sebagai mediator, yang pembela nasib masyarakat setempat, ternyata dalam kenyataan lebih banyak berpihak pada kepentingan kekuatan komersial. Di Kalimantan, misalnya, studi yang dilakukan Ruwiasuti *et al.* (1997) (Akhmad, 2005), menemukan bahwa tanah adat dan tanah milik orang Dayak sebagai penduduk lokal seringkali dikorbankan untuk kepentingan yang bersifat ekstraktif atau kepentingan orang-orang yang datang dari luar daerah, sehingga bisa dipahami jika di sana muncul gejolak dan protes keras masyarakat lokal. Hal yang sama tidak mustahil juga terjadi jika di Teluk Bintuni proses industrialisasi yang sudah dan tengah berlangsung ternyata tidak atau kurang berpihak kepada kepentingan masyarakat lokal, dan terlebih-lebih lagi jika hasilnya justru mengalienasikan dan memarginalisasi penduduk setempat.

Di kawasan Teluk Bintuni, saat ini tercatat ada puluhan perusahaan, dengan latar belakang dan variasi usaha yang bermacam-macam, mulai dari usaha di sektor perkebunan, kehutanan, perikanan, dan juga pertambangan. BP Berau sendiri sebagai kontraktor bagi hasil untuk produksi minyak dan gas di area Teluk Bintuni, termasuk salah satu investor baru yang mulai masuk ke Bintuni sekitar empat-lima tahun terakhir. Sekalipun hingga kini BP Berau belum benar-benar memproduksi, tetapi kehadiran BP Berau

di kawasan Teluk Bintuni berikut semua pranatanya, sedikit-banyak telah mempengaruhi kehidupan masyarakat lokal, khususnya kampung-kampung yang terkena dampak langsung pembangunan industri baru ini. Relokasi penduduk setempat dan pembangunan sarana dan prasarana yang dilakukan selama persiapan produksi, khususnya pembangunan kilang minyak dan gas, serta kelak ketika BP sudah benar-benar memproduksi tentu akan melahirkan dinamika perubahan sosial-budaya tersendiri.

Seperti terjadi di wilayah manapun, industrialisasi dan masuknya pendatang di sebuah komunitas yang sebelumnya terisolasi seperti di kawasan Teluk Bintuni ini, niscaya akan melahirkan perubahan. Masyarakat setempat yang sebelumnya hidup sederhana, subsisten dan komunal, cepat atau lambat akan berubah lebih modern, terkontaminasi pola-pola hubungan yang sifatnya kontraktual, dan menjadi lebih rasional serta kritis terhadap hal-hal yang terjadi di sekitarnya.

Perubahan ini terjadi, tak lain sebagai akibat bergesernya sistem nilai budaya masyarakat setempat yang kian berorientasi ke pertimbangan-pertimbangan yang lebih kalkulatif, dan rasional ketika harus memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Sebagai perbandingan: di masyarakat Kei, Maluku Tenggara, misalnya, kontrol lemah oleh sistem adat dan instansi kehutanan serta penetrasi kekuatan komersial yang bergerak di bidang usaha kehutanan, telah kian mempercepat terjadinya kemunduran kualitas alam di Pulau itu dan perubahan suku Kei ke arah yang lebih rasional dan komersial (Lobja, 2003).

Metode dan Fokus Studi

Studi yang tengah dilaporkan ini pada dasarnya merupakan kajian Antropologi-Sosial yang mencoba memahami secara menyeluruh pola kehidupan suku-suku dan komunitas lokal di sekitar area pembangunan industri tambang gas BP di Teluk Bintuni. Studi ini tidak hanya hendak melakukan kajian etnografis untuk mendeskripsikan aspek sosio-kultural suku-suku dan komunitas lokal di sekitar Teluk Bintuni. Studi ini akan juga sekaligus mengkaji dinamika perubahan sosial, budaya, politik dan ekonomi yang terjadi, termasuk di dalamnya

¹¹ Lihat Kata Pengantar San Afri Awang, dalam buku: Erick Lobja, *Menyelamatkan Hutan dan Hak Adat Masyarakat Kei, Tinjauan Terhadap Praktek Pengelolaan dan Pemanfaatan Lahan Hutan oleh masyarakat Tradisional Kei*. Jogjakarta: Debut Press, 2003, halaman xxiv. Menurut Awang terjadinya perusakan sumber daya alam dan kekayaan hutan, jika ditelusuri niscaya akan bermuara pada konflik kepentingan antara aktor pemain dan pemanfaat sumberdaya hutan.

potensi konflik yang timbul berkaitan dengan adanya proses industrialisasi sebagai akibat kehadiran industri pertambangan minyak dan gas BP Berau.

Lokasi penelitian yang dikaji difokuskan pada kampung-kampung yang terkena dampak langsung (DAVs) proses industrialisasi akibat kehadiran perusahaan minyak dan gas BP Berau. Penelitian lapangan dan penelusuran informasi yang dibutuhkan dilakukan serentak di kampung-kampung yang menjadi lokasi penelitian dilakukan oleh dua kelompok tim peneliti. Kelompok pertama, mengkaji suku-suku dan komunitas lokal di kampung-kampung bagian pantai Utara, yang meliputi: Weriagar, Mogotira, Tomu, Ekam, dan Taroy di Distrik Aranday, Kabupaten Bintuni, Propinsi Papua. Kelompok kedua, mengkaji kampung-kampung bagian pantai Selatan, yang meliputi: Tofoy, Tanah Merah, dan Saengga, termasuk dusun Onar Lama dan Onar Baru di Distrik Babo, Kabupaten Bintuni dan Toweri (Otoweri di Distrik Kokas dan Tomage di Distrik Bomberay), Kabupaten Fak-Fak. Adanya perluasan lokasi *seismic* di Amutu di Distrik Babo, maka lokasi penelitian ditambah Distrik Babo, lokasi yang berada dekat *Camp* BP di Babo.

Industrialisasi dan Eksistensi Masyarakat Lokal: Hasil Studi

Di kalangan masyarakat yang sudah berkembang dan maju, industrialisasi acapkali diyakini dan juga terbukti sebagai jalan keluar untuk mengurangi kemiskinan dan keterbelakangan masyarakat lokal. Tetapi, di komunitas yang secara geografis dan sosial relatif terisolasi dan termasuk daerah pedalaman, kegiatan pembangunan dan industrialisasi yang merambah ke wilayah seperti kawasan Teluk Bintuni, Papua sering kali justru melahirkan berbagai problema sosial budaya dan kebutuhan untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian atau adaptasi menyikapi kehadiran situasi dan kondisi baru yang terus berubah karena dihela industrialisasi dan kehadiran para pendatang.

Di kawasan Teluk Bintuni, sejak industrialisasi masuk sekitar tiga dekade lalu -dan belakangan ini bahkan makin intensif- bisa kita lihat sebagian besar penduduk setempat yang awalnya hidup dalam struktur ekonomi yang sederhana dan tidak mengalami deferensiasi sosial sebagai nelayan, baik Suku Sebyar maupun Simuri, kini sudah mengenal teknologi modern, pranata dunia industri yang serba kontraktual, tawaran gaya hidup baru, media, dan interaksi sosial yang makin beragam

akibat kehadiran para pendatang. Seperti halnya hasil kajian yang dilakukan Affandi (1991-1992), Apomfires dan Sapulete (1993) (lihat: Laksono, 2000), bahwa modernisasi yang merambah daerah di sekitar daerah Kepala Burung dan Papua pada umumnya terjadi akibat adanya kontak kebudayaan dengan suku-suku bangsa lain dari luar Papua, dan terbukti kehadiran migran dari luar daerah ternyata berperan penting dalam perubahan struktur kegiatan ekonomi masyarakat lokal, khususnya pada sektor pasar tenaga kerja.

Banyak kajian telah membuktikan, bahwa dalam proses pembangunan dan industrialisasi, yang namanya penduduk lokal umumnya mereka cenderung menjadi korban persekutuan antara modal dan kekuasaan politik. Studi ini menemukan adanya indikasi bahwa investasi di sektor ekstraktif yang bertujuan mengeksplorasi dan mengeksploitasi kekayaan sumber daya alam (hutan, tambang dan laut) demi akumulasi modal, bukan saja telah melahirkan proses perubahan sosial-budaya dan kesenjangan sosial, tetapi juga menyebabkan munculnya keresahan, dan bahkan resistensi sosial di kalangan penduduk lokal yang teralienasi dari proses pembangunan yang sedang berlangsung di wilayahnya.

Di atas kertas, mungkin benar bahwa penetrasi modal yang eksploitatif ke dalam perekonomian suku-suku asli di wilayah pedalaman yang didukung oleh negara akan bermanfaat dalam memajukan kaum minoritas suku asli melalui program-program perubahan sosial yang terarah (Ghee dan Gomes, 1999: 1-3). Tetapi, ketika industrialisasi dan seluruh pranata yang menyertainya merambah ke kehidupan masyarakat lokal yang dalam banyak hal dinilai tidak serasi dengan kepentingan dunia industri, maka cepat atau lambat yang terjadi adalah makin melebarnya kesenjangan dan jarak sosial antara penduduk asli dan para pendatang yang secara sosial-ekonomi lebih siap merespon perubahan. Di berbagai wilayah pedalaman, bukan rahasia lagi bahwa degradasi sumber daya alam setempat umumnya selalu diiringi dengan peningkatan konsumerisme yang digerakkan oleh pesona mode di sektor konsumtif, lalu ujung-ujungnya bermuara pada terjadinya krisis identitas dan disintegrasi sosial (Laksono, dalam: Topatimasang, 2004: 8).

Studi yang tengah dilaporkan ini, pada batas-batas tertentu menemukan bahwa berbagai masalah sosial budaya yang muncul di masyarakat lokal di kawasan teluk Bintuni sesungguhnya bukan terjadi dalam kurun waktu tiga-lima tahun terakhir saja, melainkan bisa dilacak puluhan tahun silam tatkala

kekuatan komersial mulai masuk ke wilayah ini. Permasalahan yang dihadapi penduduk di sekitar Kawasan Teluk Buntuni, termasuk Kecamatan Babo mulai mencuat sejak adanya intervensi berbagai perusahaan penebangan kayu komersial yang sangat mengganggu keamanan sumber pangan penduduk setempat dan bertambah parah ketika eksploitasi sumber daya perikanan perairan setempat dilakukan makin intensif. Studi ini menemukan, sumber daya perikanan, seperti populasi ikan, udang, ikan hiu, dan buaya di kawasan Teluk Bintuni menurun drastis karena kegiatan nelayan perburuan dan penggunaan teknologi perikanan yang tidak terkontrol. Di Teluk Bintuni pada tahun 1992, diidentifikasi ada sekitar 200 kapal *Trawler* besar yang menyapu seluruh potensi sumber daya perikanan hingga ke pinggir hutan mangrove, sehingga menyebabkan kesempatan penduduk setempat untuk mencari hasil laut menjadi makin sempit dan sulit.

Bagi perusahaan atau industri yang mulai masuk ke wilayah Teluk Bintuni dalam kurun waktu lima tahun terakhir, seperti BP, acapkali harus berhadapan dengan kondisi dan dampak industrialisasi yang sebetulnya sudah berlangsung jauh sebelum mereka masuk, sehingga tidak jarang situasi dan kendala yang dihadapi menjadi jauh lebih rumit.

Dalam proses perubahan sosial yang terjadi begitu cepat, tidak mudah bagi suku-suku atau lokal di kawasan Teluk Bintuni untuk menyesuaikan diri atau beradaptasi dengan akselerasi perubahan dan tuntutan situasi baru yang berlangsung di sekitar mereka. Dengan latar belakang pendidikan relatif rendah dan kualitas SDM yang tidak sesuai dengan kriteria dan kepentingan dunia industri yang menuntut profesionalisme, sebagian besar penduduknya nelayan, tidak banyak hal yang bisa dilakukan penduduk setempat untuk beradaptasi dengan proses perubahan yang terjadi di hadapan mereka. Bahkan, studi ini menemukan tidak sedikit penduduk setempat bukan saja belum dapat terserap dan ikut menikmati kegiatan industrialisasi yang tengah berlangsung di sekitarnya, tetapi mereka acapkali juga menjadi bingung terhadap perubahan situasi yang berlangsung terlalu cepat.

Pada saat studi ini dilakukan, keresahan dan ketidakpuasan penduduk setempat terhadap kegiatan pembangunan yang merambah wilayahnya sedikit-banyak mulai merebak. Walaupun keresahan dan resistensi sosial yang berkembang belum terorganisasi dan seintens yang terjadi di wilayah Papua yang lain -seperti di Timika, misalnya- akan tetapi tanda-tanda perkembangan ke arah sana bukan berarti tidak ada. Di kawasan Teluk Bintuni,

salah satu permasalahan yang seringkali muncul adalah konflik mengenai tanah dan hukum, antara penduduk lokal dengan kekuatan komersial, dan dengan pemerintah daerah. Keberadaan penduduk lokal acapkali kurang terabaikan, sebab kegiatan industrialisasi dan pembangunan yang bersifat eksploitatif dan dirancang serba rasional pelan-pelan telah menggerogoti daya tahan sosial masyarakat lokal, dan pada kasus-kasus tertentu telah menjadi titik rawan bagi munculnya disintegrasi masyarakat, termasuk munculnya ketidakpercayaan (*distrust*) terhadap hal-hal yang berkaitan dengan industrialisasi.

Di sembilan kampung yang terkena langsung dampak industrialisasi, yang namanya perasaan *in-group versus out-group* atau secara antropologis disebut etnosentrisme per kelompok -yaitu apa yang terbaik menurut penduduk lokal kampung, kelompok pendatang, BP, Pemerintah Daerah Bintuni (Dinas/Instansi terkait)-, belakangan ini tampak makin lama makin kentara. Kehadiran pendatang, termasuk berbagai pranata yang dibawa dunia industri kini seringkali dipandang dengan tatapan curiga, penuh syak wasangka. Walaupun di masyarakat sebetulnya sudah dikucurkan berbagai bantuan dan digulirkan berbagai program kompensasi sosial atas hilangnya hak-hak warga masyarakat setempat yang diambil-alih kegiatan industrialisasi. Tetapi, karena pendistribusian berbagai bantuan acapkali kurang merata, dan eksistensi serta kepentingan masyarakat lokal acapkali juga kurang terakomodasi, maka bisa dipahami jika ada sebagian warga masyarakat yang tidak puas dengan keadaan yang ada. Sepanjang titik kompromi dan kesepahaman antara dunia industri dengan logika berpikir masyarakat di kawasan Teluk Bintuni belum ketemu, berdasar kondisi kebudayaan lokal, maka yang terjadi akhirnya bukan hanya perbedaan kepentingan, tetapi juga kesenjangan sosial, dan bahkan konflik dengan intensitas yang fluktuatif, meskipun belum benar-benar *manifest*.

Di kawasan Teluk Bintuni, keberadaan sekitar 7 suku besar yang berbeda-beda, dan kemudian dipertegas dengan perbedaan perlakuan yang diterima dari kekuatan komersial yang masuk ke wilayah itu, selain menyebabkan memudarnya kohesi sosial antarsuku satu dengan yang lain, dalam batas-batas tertentu juga memunculkan terjadinya proses soliterisasi, yakni proses memudarnya rasa solidaritas antarsuku, makin menggumpalnya batas-batas deferensiasi sosial antarsuku yang berbeda, dan bahkan ditandai pula dengan lahirnya kecemburuan sosial, karena itu lahirnya bukan pola stratifikasi sosial baru namun berdasar perbedaan perlakuan

pemberian kompensasi karena dalam kebudayaan dan pola kehidupan masyarakat nelayan yang tinggal di kampung itu lebih melihat pada bentuk barang, benda, bangunan rumah dan fasilitas lain secara nyata. Itu sebabnya sosialisasi yang telah dilakukan BP kurang efektif dan penduduk kurang faham, dengan keterbatasan kemampuan berbahasa Indonesia penduduk dan pendampingan BP relatif kurang intensif di lapangan, sehingga kecemburuan sosial budaya itu timbul karena mereka tidak memperoleh bentuk kompensasi yang sama, padahal kampung-kampung mereka sama-sama mendapat dampak eksplorasi dan eksploitasi LNG. Buktinya penduduk lokal yang pernah atau sedang bekerja di Kontraktor atau BP tetap bergaul dan berkomunikasi seperti biasanya ketika mereka belum bekerja di BP/kontraktor, hanya saja mereka yang bekerja di BP/kontraktor punya baju seragam yang merupakan kebanggaan mereka sebagai prestise di masyarakat dan mempunyai baju yang lebih bagus dibandingkan penduduk lokal lainnya yang tinggal di kampung yang sama atau kampung-kampung lain -yang lebih berdasarkan pada basis material- bukan tradisi dan hal-hal yang sifatnya *ascribed*.

Di kalangan suku-suku pedalaman Teluk Bintuni, boleh dikata saat ini telah lahir sebuah era baru. Jangan dibayangkan bahwa yang namanya suku-suku pedalaman di kawasan Teluk Bintuni hanya diwakili sosok-sosok manusia yang serba tradisional, subsisten, lugu, dan terisolasi dari pengaruh teknologi dan media modern. Tatkala kegiatan industrialisasi makin *massif*, dan para pendatang juga terus masuk, maka selain terjadi perubahan gaya hidup dan cara berpikir masyarakat setempat, yang tak kalah menarik adalah lahirnya pola hubungan sosial yang makin kontraktual, komersial, dan bahkan tidak sedikit generasi muda di sana yang memperlihatkan gaya hidup kota. Boleh dikata se bagian besar pemuda setempat kini mulai kehilangan akar budayanya, mereka kurang lagi mengenal “Bahasa Ibu”, dan bahkan mengadopsi gaya hidup yang modern: berdansa dengan musik yang hingar-bingar, dan melantai dengan pasangannya masing-masing dengan gaya yang benar-benar tak beda dengan yang mereka tonton di televisi.

Atas dasar kajian yang dilakukan di lapangan, dan *review* terhadap sejumlah hasil penelitian dan data sekunder yang diperoleh, beberapa temuan pokok yang perlu memperoleh perhatian khusus adalah: (1) Di kawasan Teluk Bintuni, kemampuan penduduk lokal melakukan deversifikasi usaha umumnya masih kurang berkembang karena keterbatasan pendidikan dan ketrampilan yang dikuasai. Sebagai bagian

dari masyarakat pedalaman yang jauh dari “pusat”, acapkali penduduk setempat lebih mengembangkan pola kehidupan yang sifatnya subsisten, karena sebagian besar penduduk lokal melakukan kegiatan usaha yang diwarisi dari generasi di masa lalu secara turun-temurun, dan dalam banyak hal mereka gagap atau bingung, ketika harus beradaptasi dengan situasi perubahan baru yang jauh berbeda dari kehidupan sebelumnya, (2) Kemampuan penduduk lokal dalam mengakses sumber daya alam yang ada di wilayahnya cenderung makin kecil, karena kalah bersaing dengan kehadiran teknologi dan peralatan produksi yang lebih modern yang dibawa kekuatan industri. Usaha-usaha tradisional yang ditekuni penduduk, seperti meramu, menokok sagu, atau mencari ikan di laut, pelan-pelan makin tersisih ketika di wilayah mereka hadir usaha berskala besar yang mengeksplorasi sumber daya alam setempat dengan peralatan dan teknologi yang jauh lebih modern dan efisien, (3) Terjadinya kesenjangan antara tuntutan kebutuhan profesionalisme dunia industri dengan kualitas SDM penduduk lokal. Fenomena ini terjadi, karena kehadiran industri dan berbagai pranata yang menyertainya, jelas menuntut pola hubungan yang lebih bersifat kontraktual dan profesional, yang acapkali bagi penduduk setempat merupakan hal yang sulit dipenuhi dalam jangka pendek, (4) Industrialisasi dan kehadiran para pendatang umumnya menyebabkan terjadinya pergeseran gaya hidup di kalangan generasi muda, dan menyebabkan peran tradisi serta adat-istiadat pada akhirnya hanya tinggal sebagai ritus dan mengalami *entropi budaya*: tetap eksis, tetapi tidak memiliki daya untuk menentukan perilaku warga masyarakatnya. Pada batas-batas tertentu, perubahan yang terlalu cepat pada akhirnya melahirkan apa yang disebut *culture shocks* di kalangan generasi muda dan *cultural lag* atau keterlambatan budaya masyarakat lokal pada umumnya, (5) Industrialisasi dalam beberapa hal menyebabkan memudarnya daya kohesi sosial sesama penduduk lokal, dan bahkan memantik timbulnya kecemburuan sosial. Solidaritas dan ikatan sosial yang semula mampu menjadi jaring pengaman atau asuransi sosial bagi masyarakat setempat menyikapi tekanan kebutuhan, kini pelan-pelan mulai memudar, dan digantikan oleh pola-pola hubungan sosial yang lebih bersifat kontraktual, dan bahkan eksploitatif, yaitu mementingkan keuntungan pribadi, (6) Resistensi sosial dan konflik yang timbul di kalangan penduduk lokal umumnya dipicu oleh adanya perlakuan yang dinilai tidak adil dari dunia industri yang masuk ke wilayah setempat. Pemberian bantuan yang hanya diberikan kepada penduduk

di kampung tertentu, jelas menjadi penyebab munculnya ketidakpuasan penduduk lokal di wilayah kampung lain yang tidak memperoleh kompensasi yang sama, (7) Peran tradisi dan adat-istiadat dalam kehidupan penduduk lokal cenderung makin bersifat instrumental. Keberadaan adat-istiadat dan tradisi dalam beberapa kasus dijadikan alat dan legitimasi untuk memperjuangkan kepentingan tertentu, namun tidak memiliki kekuatan pengikat yang sama jika berkaitan dengan kepentingan pihak-pihak tertentu, (8) Dalam proses industrialisasi yang berlangsung cepat keberadaan kearifan lokal cenderung makin tersisih dan tidak lagi dimanfaatkan untuk memecahkan masalah sehari-hari yang dihadapi penduduk setempat, seperti ditengarai muncul prostitusi terselubung oleh ibu-ibu rumahtangga, yang rawan penyebaran HIV/AIDS, namun cenderung kurang diperhatikan. Meskipun program-program TCHU yang lebih bisa diterima penduduk, namun TCHU tidak dapat bekerja sendiri, tanpa kerjasama dari tokoh-tokoh setempat dan kepala kampung, yang hanya malu saat kasus ini dibicarakan namun belum ada tindakan konkrit dilakukan, (9) Sekalipun peran perempuan sangat strategis dalam mendukung kelangsungan hidup keluarga, tetapi kesempatan mereka untuk beraktualisasi diri umumnya masih sangat terbatas akibat masih kuatnya budaya patriarkhis di masyarakat setempat. Di berbagai kampung, akses perempuan terhadap proses pengambilan keputusan umumnya lemah atau bahkan tidak ada. Berbagai keputusan penting yang menyangkut publik umumnya lebih banyak didominasi laki-laki, dan kurang mempertimbangkan kepentingan perempuan.

Strategi Pemberdayaan Masyarakat Lokal

Keinginan untuk memperbaiki taraf hidup dan memberi peluang kepada penduduk lokal di kawasan Teluk Bintuni agar dapat lebih berdaya, harus diakui bukan merupakan hal yang mudah dan jauh lebih mudah diucapkan daripada dilakukan dan dibuktikan di lapangan. Berbagai persoalan yang muncul dan dihadapi penduduk lokal di sekitar Teluk Bintuni sesungguhnya adalah masalah sosial yang jauh lebih kompleks dari sekadar persoalan keterbelakangan, kekurangan pendapatan, tidak dimilikinya aset produksi untuk melangsungkan kehidupan, atau sekadar imbas dari proses industrialisasi yang kurang melibatkan partisipasi penduduk setempat.

Dalam kenyataan sering terjadi alokasi dana

yang dikucurkan dan program yang digulirkan dunia industri maupun Pemerintah Daerah ternyata tetap saja kalah dengan akselerasi besaran masalah yang berkembang di masyarakat lokal sekitar Teluk Bintuni. Dengan kata lain, untuk mencegah agar proses industrialisasi yang tengah berlangsung di kawasan Teluk Bintuni tidak makin menjejas dan mematikan potensi swakarsa penduduk lokal, selain dibutuhkan program pemberdayaan masyarakat lokal yang tidak dilakukan secara sepotong-potong, parsial, dan hanya bersifat temporer, yang tak kalah penting adalah memikirkan kembali apakah substansi program yang dirancang benar-benar telah sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan penduduk setempat.

Untuk jangka pendek, berbagai program yang semata-mata hanya bersifat karitatif memang akan fungsional untuk mencegah agar keresahan dan *culture shock* yang terjadi di masyarakat tidak kontra-produktif bagi jalannya kegiatan industrialisasi. Tetapi, berbagai program yang sekadar hanya berfungsi sebagai “pemadam kebakaran” dan memberi berbagai fasilitas yang hanya berorientasi pada upaya meredam ketidakpuasan dan sikap kritis masyarakat lokal, niscaya hasilnya hanya akan bersifat temporer. Bahkan, yang mengkhawatirkan, bukan tidak mungkin berbagai program yang sifatnya karitatif ini justru akan menyebabkan makin mudarnya kemampuan penduduk lokal untuk memberdayakan dirinya sendiri. Lebih dari sekadar program yang sifatnya karitatif dan malah berpotensi mematikan mekanisme *self-help*, yang dibutuhkan masyarakat lokal di sebuah wilayah yang dilanda modernisasi dan industrialisasi sesungguhnya adalah program pembangunan yang sifatnya partisipatif, kontekstual, dan menempatkan kesejahteraan masyarakat sebagai pertimbangan utama dalam merumuskan setiap kebijakan maupun program pembangunan yang akan digulirkan ke masyarakat lokal.

Dengan mengacu pada sejumlah isu prioritas sebagaimana telah dipaparkan di atas, maka program-program intervensi yang dikembangkan ke depan harus benar-benar komprehensif, tidak berhenti hanya pada tingkat wilayah dan kelembagaan saja, tetapi juga perlu menyentuh perbaikan pada tingkat komunitas, keluarga dan bahkan individu.

Di tingkat wilayah, salah satu persoalan yang dihadapi daerah pedalaman seperti Teluk Bintuni adalah keterisolasian dan letak geografis wilayah yang jauh dari pusat pemerintahan. Seperti juga wilayah pedalaman lain, kondisi berbagai fasilitas publik dan fasilitas ekonomi di Teluk Bintuni

umumnya sangat minimal, sehingga untuk jangka pendek sudah selayaknya dilakukan upaya yang sungguh-sungguh untuk menyediakan berbagai fasilitas publik dan ekonomi yang dibutuhkan untuk melayani masyarakat yang ada di wilayah tersebut. Pembangunan berbagai sarana dan prasarana yang mendasar di berbagai kampung di kawasan Teluk Bintuni, seperti sekolah, pasar, pusat layanan kesehatan, tempat ibadah, tokoh-tokoh penyebar agama (ustad/kyai bagi yang beragama Islam dan pendeta bagi agama non Islam), jalan, fasilitas air bersih, penerangan, dan sebagainya adalah hal-hal yang semestinya menjadi skala prioritas utama Pemerintah Daerah dan swasta sebagai bagian dari kompensasi dan program reinvestasi sosial yang menjadi tanggung jawab moral dunia industri yang menanamkan modal di wilayah itu.

Di tingkat kelembagaan, yang terpenting di sini adalah bagaimana merevitalisasi peran lembaga-lembaga dan pranata lokal yang berfungsi sebagai badan penyangga agar lebih berpihak kepada kepentingan masyarakat setempat, dan bagaimana mendorong peran lembaga-lembaga lokal agar lebih mendukung proses transparansi pelaksanaan program pembangunan yang dijalankan. Sudah barang tentu, untuk menjamin agar dapat dibangun lembaga-lembaga yang berpihak kepada penduduk lokal di kawasan Teluk Bintuni, selain keterbukaan, yang dibutuhkan pertama kali adalah kesediaan dari jajaran birokrasi Pemerintah Daerah untuk mengubah cara pandang mereka yang semula lebih banyak dipenuhi syak wasangka kepada penduduk pedalaman dan masyarakat miskin pada umumnya menjadi cara pandang yang lebih simpatik dan empatif kepada masyarakat setempat.

Di tingkat komunitas, yang terpenting adalah bagaimana mengembangkan program pemberdayaan masyarakat lokal yang bertumpu pada pranata-pranata lokal yang bersumber dan memiliki akar kultural di masyarakat itu sendiri. Michael R. Dove (1985) —seorang Antropolog yang banyak mengkaji tentang peran kebudayaan tradisional— dengan tegas menyatakan bahwa yang disebut tradisional —termasuk di dalamnya pranata-pranata sosial-budaya lokal— tidak harus berarti terbelakang dan keberadaan budaya tradisional pada hakekatnya tidak mengganggu proses pembangunan.

Menurut Dove, budaya tradisional sangat dan selalu berkaitan dengan proses perubahan ekonomi, sosial dan politik dari masyarakat pada tempat di mana budaya tradisional tersebut melekat. Di lingkungan komunitas masyarakat miskin di mana pun —termasuk di Kawasan Teluk Bintuni—

keberadaan berbagai pranata dan institusi-institusi lokal, bukan saja berfungsi positif untuk menetralkan dan mengeliminasi tekanan kesenjangan, tetapi sebetulnya juga bisa dimanfaatkan sebagai wadah pengembangan jaringan sosial dan pemberdayaan kelompok masyarakat setempat agar mereka dapat lebih berdaya atau meningkat posisi *bargaining*-nya.

Pembentukan institusi baru di lingkungan masyarakat lokal yang diformat dari “atas” (*top-down*) dan kemudian ditransplantasikan secara *instant*, niscaya akan kurang terjaga keberlanjutannya, dan bahkan seringkali hanya formalitas. Hal ini berbeda jika program pemberdayaan yang dilakukan bersedia memanfaatkan pranata-pranata lokal yang sudah ada dan *terinternalized* di lingkungan masyarakat setempat. Berbagai institusi lokal, seperti forum pertemuan warga, relasi sosial yang sudah terbangun di kalangan warga masyarakat setempat, dan jaringan sosial yang sudah lama terbentuk, niscaya akan lebih berpeluang dikembangkan dan dimanfaatkan sebagai media untuk meningkatkan kadar keberdayaan komunitas masyarakat lokal di Teluk Bintuni daripada lembaga-lembaga sosial baru yang terkadang malah menimbulkan alienasi sosial.

Seperti dikatakan Nat J. Colletta (1987), bahwa unsur-unsur budaya lokal —termasuk di dalamnya pranata-pranata lokal— sesungguhnya adalah media yang memungkinkan pembangunan berlangsung dengan sukses karena paling kurang tiga alasan berikut: (1) unsur-unsur budaya mempunyai legitimasi tradisional di mata orang-orang yang menjadi sasaran program pembangunan, (2) unsur-unsur budaya secara simbolis merupakan bentuk komunikasi yang paling berharga dari penduduk setempat, dan (3) unsur-unsur budaya mempunyai aneka-ragam fungsi, baik yang terwujud maupun yang terpendam, yang sering menjadikannya sebagai sarana paling berharga untuk perubahan dibandingkan dengan yang tampak di permukaan jika hanya dilihat dalam kaitannya dengan fungsinya yang terwujud saja (Colletta dan Kayam, 1987: 5).

Di tingkat keluarga, yang terpenting adalah bagaimana memberi kesempatan dan memberdayakan kemampuan *bargaining* dan kemampuan keluarga-keluarga yang ada di kawasan Teluk Bintuni untuk melakukan deversifikasi usaha. Secara teoritis, makin banyak sumber-sumber pendapatan yang dimiliki keluarga, maka dalam kenyataan sehari-hari mereka akan makin kenyal dan berdaya menyiasati tekanan perubahan dan imbas industrialisasi.

Berbagai kajian telah membuktikan, bahwa ibarat pasien yang mengalami komplikasi penyakit, perangkat keterlambatan budaya dan keterbelakangan

yang melanda kehidupan masyarakat lokal di Teluk Bintuni sesungguhnya disebabkan oleh faktor-faktor yang kompleks. Namun demikian, salah satu kekurangan pokok yang perlu diperhatikan dari berbagai upaya pemberdayaan penduduk pedalaman yang banyak dipraktekkan adalah bahwa mereka menjadi begitu memusatkan perhatian pada peningkatan kuantitas produksi atau hasil, sehingga kebutuhan sistem produksi mendapat tempat yang lebih utama daripada kebutuhan investasi bagi masa depan.

Dalam hal ini, yang perlu disadari bahwa upaya meningkatkan kesejahteraan penduduk pedalaman tidak selalu harus dengan cara memacu perkembangan dan semata hanya berusaha meningkatkan volume atau jumlah produksi. Untuk meningkatkan kadar keberdayaan penduduk pedalaman di Teluk Bintuni alangkah baiknya jika sejak awal mereka dipersiapkan dan didorong untuk mengembangkan kegiatan usaha yang beraneka-ragam atau satu dengan yang lain saling berbeda antar anggota keluarga. Pengalaman yang sudah-sudah membuktikan bahwa sebuah keluarga yang semata-mata hanya menggantungkan kepada satu matapencaharian —di mana suami, istri dan anak semua bekerja di sektor yang sama— umumnya secara sosial-ekonomi lebih rapuh karena jika suatu saat harga komoditi yang mereka produksi anjlok, maka itu berarti semua anggota keluarga akan kehilangan dan mengalami kerugian yang sama. Ini berbeda jika dalam sebuah keluarga, masing-masing anggota memiliki matapencaharian yang berbeda-beda. Keluarga yang mengembangkan pola diversifikasi usaha, terbukti dalam kehidupan sehari-hari mereka selalu lebih berdaya dan kenyal menyiasati tekanan kebutuhan ekonomi.

Di tingkat individu, fokus program pemberdayaan penduduk pedalaman sesungguhnya adalah pada upaya meningkatkan kualitas SDM penduduk lokal itu sendiri. Sekali pun di atas kertas semua penduduk lokal perlu diberdayakan, tetapi untuk tahap awal ada baiknya jika fokus kelompok sasaran di tingkat individu lebih diprioritaskan pada perempuan. Akses perempuan yang relatif terbatas dan adanya hegemoni nilai-nilai patriarkhis yang mensubordinasi perempuan, sudah barang tentu harus diperbaiki dengan cara merumuskan kebijakan pemberdayaan penduduk pedalaman yang lebih sensitif pada persoalan gender dan memprioritaskan kaum perempuan setempat. Studi ini telah membuktikan bahwa peran perempuan dalam mendukung kelangsungan hidup keluarga umumnya sangat strategis, tetapi ironisnya peran mereka dalam banyak hal masih sangat terbatas dan dibatasi.

Prasyarat yang Dibutuhkan

Beberapa prasyarat yang dibutuhkan untuk lebih menjamin percepatan dan efektivitas pelaksanaan program pemberdayaan dan meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat pedalaman di kawasan Teluk Bintuni adalah:

Pertama, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedalaman, khususnya suku-suku di kawasan Teluk Bintuni dan bagaimana meningkatkan posisi *bargaining* mereka terhadap semua bentuk eksploitasi dan sikap superordinasi, tak pelak prasyarat yang dibutuhkan, selain berbagai kemudahan ekonomi (*economic facilities*) yang benar-benar nyata, yang tak kalah penting adalah terciptanya peluang-peluang sosial (*social opportunities*) yang memihak kepada penduduk setempat. Yang dimaksud kemudahan ekonomi, adalah kesempatan dan makin terbukanya akses masyarakat lokal terhadap berbagai sumber permodalan dan pasar yang tidak dibayangkan dengan syak wasangka yang seringkali mendiskreditkan masyarakat pedalaman. Sedangkan yang dimaksud peluang-peluang sosial adalah upaya untuk meningkatkan akses penduduk lokal terhadap berbagai fasilitas dan kebutuhan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, dan bahkan kebutuhan untuk melakukan partisipasi politik secara aktif.

Kedua, agar kegiatan industrialisasi yang tengah berlangsung tidak melahirkan alienasi dan marginalisasi penduduk setempat, maka yang dibutuhkan sebetulnya adalah pengakuan dan penghargaan terhadap hak-hak masyarakat adat, dan tuntutan utama penduduk lokal yang harus diperhatikan bukanlah sekadar memenuhi ganti-rugi sesuai kalkulasi secara ekonomi semata, tetapi juga harus mempertimbangkan eksistensi dan kebutuhan penduduk setempat untuk beraktualisasi: bekerja sesuai harkatnya dan memperoleh perlakuan yang adil sebagaimana layaknya penduduk asli yang tinggal dan hidup di sebuah kawasan yang sumber daya alamnya kini dikelola oleh kekuatan komersial bermodal besar. Satu hal yang perlu disadari oleh para pemilik modal, bahwa garansi kelangsungan usaha mereka kini tidak lagi bisa disandarkan hanya pada kekuatan militer dan kekuasaan politik dari pusat saja, melainkan yang terpenting garansi sosial itu justru harus diperoleh dari keterlibatan dan *sense of belonging* rakyat setempat.

Ketiga, salah satu tanggung jawab moral yang semestinya dipenuhi oleh para kekuatan komersial yang menanamkan modal di kawasan Teluk Bintuni adalah komitmen untuk melaksanakan program “reinvestasi sosial”, yang seharusnya tercermin

dari kegiatan *Community Development* (CD) dan *Resettlement* yang disalurkan untuk memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan penduduk setempat. Dengan melakukan program reinvestasi sosial ini diharapkan keberadaan penduduk lokal tidak hanya menjadi penonton atas hiruk-pikuk kegiatan industri yang berlangsung di wilayahnya. Tetapi, mereka cepat atau lambat dapat merespon dan bahkan terlibat untuk ambil bagian dalam proses industrialisasi yang sedang berlangsung karena kualitas SDM masyarakat setempat sejak dini ikut pula dipersiapkan. Sudah barang tentu, untuk menjamin efektivitas program reinvestasi sosial yang dilakukan seyogianya dihindari kemungkinan program yang dilakukan di lapangan terjerumus menjadi program yang sifatnya karitatif semata, yang ujung-ujungnya malah hanya mematikan mekanisme *self-help* masyarakat setempat daripada memberdayakannya secara nyata.

Keempat, apapun program yang digulirkan dan berapapun dana yang disalurkan untuk memberdayakan masyarakat di kawasan Teluk Bintuni, salah satu yang penting dilakukan adalah meningkatkan peran lembaga-lembaga lokal dan kelompok sekunder di masyarakat lokal dalam upaya monitoring dan pelaksanaan program di lapangan. Agar pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat setempat tidak mengalami penyimpangan atau bias di tingkat pelaksanaan, maka prasyarat yang dibutuhkan selain harus ada jaminan bahwa proses pelaksanaan program berjalan secara transparan, yang tak kalah penting adalah harus didukung oleh mekanisme dan sistem kontrol yang kuat, khususnya pelibatan dan kontrol dari masyarakat lokal itu sendiri.

Untuk menjamin efektivitas sebuah kebijakan, bantuan atau program sosial apapun yang ditujukan kepada penduduk lokal di kawasan Teluk Bintuni, oleh sebab itu selain harus benar-benar terfokus kepada keluarga-keluarga, di saat yang sama pelaksanaan program tersebut harus dibarengi dengan upaya-upaya perlindungan yang memihak. Program pembangunan sektor sosial —dalam bentuk apapun, entah bantuan modal usaha, bantuan teknologi atau proses pendampingan— yang dimaksudkan untuk merangsang perkembangan kegiatan produktif keluarga lokal, tidak mustahil akan bersifat *meritokratis* karena tidak didukung oleh kesiapan basis sosial massa secara merata.

Seperti dikatakan Vic George dan Paul Wilding (1992), kebijakan yang berorientasi pertumbuhan

dan hanya mengutamakan kesamaan kesempatan berkompetisi —yang secara konsepsional berlawanan dengan pendekatan pembangunan yang berdimensi kerakyatan— semakin kehilangan daya tariknya karena telah terkumpul banyak bukti bahwa kebijaksanaan-kebijaksanaan yang egaliter ternyata telah membuahkan hasil yang tidak egaliter. Kedua ahli ini juga menyatakan bahwa kebijaksanaan yang terlalu menekankan unsur persamaan kesempatan saja cenderung bersifat *meritokratis*. Penekanan lebih ditujukan pada persamaan dalam bersaing daripada persamaan dalam hasil yang dicapai. Jadi, semacam turunan langsung dari individualisme yang dibalut dan dimanusiawikan melalui usaha-usaha negara kesejahteraan atau merupakan hasil konstelasi nilai-nilai yang mencerminkan kompromi antara nilai *laissez-faire* dan persamaan.

Daftar Pustaka

- Akhmad (2005) *Amber dan Komin: Studi Perubahan Ekonomi di Papua*. Yogyakarta: Bigraf Publishing.
- Colletta, Nat J. & Umar Kayam (peny.) (1987) *Kebudayaan dan Pembangunan: Sebuah Pendekatan Terhadap Antropologi Terapan di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Dove, Michael R. (peny.) (1985) *Peranan Kebudayaan Tradisional Indonesia Dalam Modernisasi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Ghee, Lim Teck & Gomes Alberto G. (eds.) (1993) *Suku Asli dan Pembangunan di Asia Tenggara*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- George, Vic & Paul Wilding (1992) *Ideologi dan Kesejahteraan Rakyat*. Jakarta: Grafiti.
- Laksono, P. M. (2000) *Perempuan di Hutan Mangrove, Kearifan Ekologis Masyarakat Papua*. Jogjakarta: Galang Press bekerjasama dengan KEHATI dan PSAP-UGM.
- Lobja, Erick (2003) *Menyelamatkan Hutan dan Hak Adat Masyarakat Kei, Tinjauan Terhadap Praktek Pengelolaan dan Pemanfaatan Lahan Hutan oleh Masyarakat Tradisional Kei*. Jogjakarta: Debut Press.
- Li, Tania Murray (ed.) (2002) *Proses Transformasi Daerah Pedalaman di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Maunati, Yekti (2004) *Identitas Dayak, Komodifikasi dan Politik Kebudayaan*. Jogjakarta: LkiS.
- Ngadisah (2003) *Konflik Pembangunan dan Gerakan Sosial Politik di Papua*. Jogjakarta: Pustaka Raja.
- Topatimasang, Roem (penyunting) (2004) *Orang-Orang Kalah*. Jogjakarta: Insist Press.